

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Analisis Perkembangan IPH Kabupaten Malang TW II Tahun 2026

1. Selama Triwulan II Tahun 2026, pergerakan **Indeks Perkembangan Harga (IPH)** Kabupaten Malang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada bulan **April**, IPH berada pada zona negatif dan terus mengalami penurunan dari **-1,11** pada Minggu I menjadi **-3,39** pada Minggu V. Kondisi ini mengindikasikan bahwa harga komoditas penyumbang IPH relatif mengalami penurunan.
2. Memasuki bulan **Mei**, terjadi perubahan yang cukup tajam. IPH melonjak dari **-3,39** menjadi **1,29** pada Minggu I, kemudian meningkat berturut-turut menjadi **1,56** pada Minggu II dan mencapai puncaknya sebesar **1,63** pada Minggu III siring momen HBKN Idul Adha 1447 H / 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan harga beberapa komoditas strategis yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat, perubahan pola konsumsi. Meskipun demikian, nilai IPH masih berada dalam kisaran yang terkendali sehingga belum menunjukkan gejala inflasi yang berlebihan.
3. Pada bulan **Juni**, tren IPH kembali mengalami penurunan menjadi **0,74** pada Minggu I, kemudian berbalik ke zona negatif sebesar **-0,54** pada Minggu II, **-1,03** pada Minggu III, dan mencapai **-1,97** pada Minggu IV.
4. Secara keseluruhan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan dinamika yang terkendali. Pada April, IPH mengalami tren penurunan yang mencerminkan kondisi deflasi relatif. Memasuki Mei, IPH berbalik meningkat dan mencapai puncaknya sebesar 1,63, menandakan adanya tekanan inflasi akibat kenaikan harga beberapa komoditas strategis. Selanjutnya, pada Juni, tekanan harga kembali mereda hingga IPH memasuki zona negatif, yang mengindikasikan stabilitas harga semakin terjaga.

Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Strategis Kabupaten Malang Triwulan II Tahun 2026

1. Berdasarkan data harga dan grafik fluktuasi harga selama Triwulan II Tahun 2026, perkembangan harga bahan pangan strategis di Kabupaten Malang menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, meskipun beberapa komoditas mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Dari sepuluh komoditas pangan strategis, mayoritas mengalami penurunan harga pada akhir triwulan dibandingkan awal triwulan, sementara hanya satu komoditas yang mengalami kenaikan yaitu bawang putih, untuk beras dan daging sapi terpantau stabil
2. Komoditas dengan penurunan harga terbesar adalah cabai merah sebesar 53%, dari Rp40.500/kg pada April menjadi Rp26.500/kg pada Juni. Penurunan tajam ini mengindikasikan siklus puncak panen sehingga mampu menekan harga di tingkat konsumen. Penurunan juga terjadi pada telur ayam ras sebesar 24%, daging ayam ras sebesar 18%, serta cabai rawit sebesar 17%, yang menunjukkan peningkatan ketersediaan pasokan.
3. Sebaliknya, bawang putih menjadi satu-satunya komoditas yang mengalami kenaikan harga sebesar 20%, dari Rp29.500/kg menjadi Rp37.000/kg.
4. Secara keseluruhan, perkembangan harga pangan strategis pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa tekanan inflasi pangan cenderung menurun pada akhir triwulan, ditandai dengan dominannya komoditas yang mengalami penurunan harga

dibandingkan kenaikan.

5. Poin utama perkembangan harga TW II 2026:

- Komoditas stabil: Beras Medium (0%), Daging Sapi (0%), Minyak Goreng (-1%), Gula Pasir (-1%), dan Bawang Merah (-1%).
- Penurunan harga terbesar: Cabai Merah (-53%), Telur Ayam Ras (-24%), Daging Ayam Ras (-18%), dan Cabai Rawit (-17%).
- Kenaikan harga: Bawang Putih (+20%), sehingga perlu menjadi perhatian dalam pemantauan pasokan dan distribusi pada triwulan berikutnya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Kenaikan harga di bulan Mei 2026 pada beberapa komoditas pangan strategis dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat, perubahan pola konsumsi selama HBKN Idul Adha 1447 / 2026, serta dinamika distribusi dan pasokan.
- Harga pangan strategis di tingkat eceran masih menunjukkan fluktuasi meskipun harga di tingkat produsen relatif stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembentukan harga di tingkat konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh panjangnya rantai distribusi dan mekanisme perdagangan pada tingkat perantara (tengkulak).
- Realisasi pengembangan kawasan bawang merah belum terlaksana, akibat keterlambatan proses penyaluran benih yang melewati masa reimbursement anggaran IFAD dan ISDB di Kementerian Pertanian. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya peningkatan produksi komoditas strategis di daerah

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

A. Strategi Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai program pengendalian harga secara terpadu melalui intervensi pasar, pemantauan harga, pengawasan distribusi, penyediaan informasi harga, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Seluruh kegiatan diarahkan untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan strategis dengan harga yang terjangkau serta mengantisipasi terjadinya gejolak harga pada tingkat konsumen.

1. Penguatan Intervensi Pasar

- Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, Bupati Malang mendampingi Gubernur Jawa Timur melaksanakan peninjauan Pasar Murah di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari pada 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan menjelang meningkatnya permintaan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama dilakukan peninjauan pasokan BBM jenis solar di SPBU Karanglo sebagai langkah memastikan kelancaran distribusi energi yang mendukung distribusi logistik pangan.
- Pelaksanaan **Pasar Sembako Murah Harga Terjangkau (SMART)** oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang diselenggarakan bersamaan

dengan kegiatan **Subuh Keliling (SULING) Putaran ke-5**. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak empat kali setiap bulan dengan menyediakan komoditas pangan strategis seperti beras SPHP, Minyakita, dan gula pasir dengan harga dibawah pasar sehingga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

- Sebagai pelengkap intervensi pasar, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang melaksanakan **Gerakan Pangan Murah (GPM)** pada tanggal 21 Mei 2026 di Rest Area Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau. Melalui kegiatan tersebut masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai komoditas pangan strategis dengan harga di bawah harga pasar sehingga dapat menekan tekanan inflasi sekaligus meningkatkan akses pangan bagi masyarakat.

2. Pengawasan Distribusi Komoditas Strategis

- Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga minyak goreng, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pengawasan distribusi Minyakita bekerja sama dengan Perum BULOG dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Pengawasan dilakukan mulai dari distributor hingga pedagang pada pasar pantauan SP2KP agar komoditas dipasarkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga stabilitas harga dapat terjaga dan masyarakat memperoleh komoditas sesuai ketentuan pemerintah.

3. Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok

- Monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin selama April-Juni 2026 pada **21 Unit Pelaksana Pasar Daerah (UPPD)** dari total **34 UPPD** yang tersebar di Kabupaten Malang. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta barang penting yang selanjutnya disusun dalam laporan harian sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
- Selain melalui pemantauan lapangan, Pemerintah Kabupaten Malang secara konsisten melakukan pembaruan data harga harian melalui **SP2KP Kementerian Perdagangan** dan **SIHARKEPO Kabupaten Malang**. Seluruh data yang diperoleh diverifikasi dan divalidasi sehingga menghasilkan informasi harga yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung identifikasi tren harga, deteksi dini gejolak inflasi, serta penyusunan kebijakan intervensi yang lebih responsif.

4. Monitoring Produk Peternakan

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang melaksanakan monitoring harga, ketersediaan, dan distribusi produk peternakan sebanyak dua kali setiap minggu melalui Petugas Informasi Pasar (PIP). Monitoring dilakukan pada pasar hewan, pasar umum, peternak, dan pelaku usaha produk peternakan sehingga perkembangan harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat dipantau secara berkala sebagai bahan evaluasi pengendalian inflasi sektor peternakan.

5. Penyediaan Informasi Harga

- Sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat, publikasi harga dan ketersediaan produk peternakan dilakukan setiap hari melalui aplikasi **SIHARKEPO Kabupaten Malang**. Penyediaan informasi harga secara berkala mendukung

keterbukaan informasi pasar, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membantu pelaku usaha dalam memperoleh referensi harga yang akurat.

B. Strategi Ketersediaan Pasokan

Strategi Ketersediaan Pasokan pada Triwulan II Tahun 2026 diarahkan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan strategis melalui peningkatan produksi, penguatan infrastruktur pertanian, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai program tersebut dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan produksi pangan, mengurangi risiko gangguan pasokan, serta menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Malang.

1. Penguatan Program UPLAND

- Pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat keberlanjutan Program *The Development of Integrated Farming System in UPLAND Areas* (UPLAND) melalui pelaksanaan **Focus Group Discussion (FGD) Exit Strategy** yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang pada tanggal 29 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil supervisi *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) dalam rangka menyusun strategi keberlanjutan program menjelang berakhirnya proyek pada 31 Desember 2026.
- Sejak dilaksanakan pada tahun 2021, Program UPLAND telah memberikan manfaat kepada **5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 20 Kelompok Tani (Poktan), dan 2 Kelompok Wanita Tani (KWT)** di Kecamatan Pujon dan Ngantang, khususnya dalam pengembangan komoditas unggulan bawang merah. Melalui penyusunan strategi keberlanjutan tersebut diharapkan hasil pembangunan yang telah dicapai dapat terus berlanjut setelah berakhirnya dukungan pembiayaan proyek internasional.

2. Pengembangan Komoditas Perkebunan

- Sebagai salah satu daerah penghasil tebu terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Malang terus mendukung peningkatan produksi gula nasional melalui Program Bongkar Ratoon Tebu. Pada tanggal 18 Juni 2026, Bupati Malang bersama Gubernur Jawa Timur menghadiri kegiatan **Panen dan Tanam Tebu Serentak** di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi. Kabupaten Malang memiliki luas areal tebu mencapai **168,95 hektare**, dengan produksi sebesar **4.294.436,80 ton** dan produktivitas rata-rata **89,153 ton per hektare**. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung program swasembada gula nasional.
- Bupati Malang mengikuti **Tanam Tebu Perdana Program Bongkar Ratoon** secara daring bersama Gubernur Jawa Timur yang dipusatkan di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanjen, 23 Mei 2026. Program ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional dalam pengembangan komoditas tebu guna memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang.

3. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

Penguatan ketahanan pangan juga dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, dan masyarakat. Wakil Bupati Malang menghadiri Pembukaan Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kecamatan Pakisaji pada 19 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Kabupaten Malang.

- Pemerintah Kabupaten Malang juga terus mendorong diversifikasi pangan melalui pengembangan produksi garam rakyat. Bupati Malang melaksanakan panen **Garam Tunnel** di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi teknologi produksi garam menggunakan *green house tunnel* berplastik UV. Teknologi tersebut mampu menghasilkan sekitar **8 ton garam per bulan**. Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan bantuan **32 unit green house tunnel**, ditambah **10 unit bantuan APBN**, sebagai upaya meningkatkan produksi garam lokal dan memperkuat ketahanan pangan wilayah pesisir.
- Sebagai bagian dari edukasi ketahanan pangan sejak usia dini, Pemerintah Kabupaten Malang bersama Yayasan Seantra Pangan Nusantara (YSPN) melaksanakan **Gerakan Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah** di SMP Negeri 1 Wajak pada tanggal 23 April 2026. Program ini bertujuan membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya ketahanan pangan melalui kegiatan budidaya dan pemanfaatan lahan sekolah secara produktif.

4. Pengembangan Komoditas Pangan Strategis

- Dalam mendukung peningkatan produksi padi, Wakil Bupati Malang melaksanakan **Panen Padi Hayati** di Desa Balearjo, Kecamatan Pagelaran pada tanggal 8 April 2026. Kegiatan ini mendorong penerapan sistem budidaya ramah lingkungan guna meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
- Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah menghadiri **Panen Raya Padi Sukma** di Kecamatan Turen pada tanggal 4 April 2026. Padi Sukma merupakan varietas unggul lokal Kabupaten Malang yang mampu menghasilkan produktivitas rata-rata sekitar **11 ton per hektare**, sehingga diharapkan menjadi salah satu komoditas unggulan dalam mendukung peningkatan produksi beras daerah.

5. Peningkatan Produksi Pertanian

- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan berbagai program peningkatan produksi pertanian. Hingga Triwulan II Tahun 2026 telah disalurkan **10 unit alat dan mesin pertanian (alsintan)** kepada kelompok tani guna meningkatkan efisiensi usaha tani. Namun demikian, program pengembangan kawasan bawang merah seluas **80 hektare** belum dapat direalisasikan karena proses penyaluran benih melewati masa *reimbursement* anggaran IFAD dan IsDB pada Kementerian Pertanian.
- Pembangunan dan pemeliharaan **11 unit jaringan irigasi usaha tani** serta pembangunan **13 unit jalan usaha tani** guna meningkatkan kelancaran distribusi hasil panen, menekan biaya logistik, menjaga keberlanjutan produksi, dan mendukung stabilitas pasokan pangan daerah.
- Upaya peningkatan produksi pangan juga dilakukan melalui intensifikasi tanaman pangan seluas **53 hektare** dari target **59 hektare**, serta pengembangan **Pekarangan Pangan Lestari (P2L)** kepada **9 kelompok tani** sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.
-

Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) telah dilaksanakan pada lahan seluas **190 hektare** dari target **203 hektare**, disertai penanganan dampak perubahan iklim pada lahan seluas **1 hektare** guna menjaga produktivitas tanaman pangan.

6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Petani

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan petani yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah menjangkau **525 anggota kelompok tani**. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi petani dalam penerapan teknologi budidaya, pengelolaan usaha tani, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani guna mewujudkan sistem pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.

C. Strategi Kelancaran Distribusi

Strategi Kelancaran Distribusi pada Triwulan II Tahun 2026 diarahkan untuk menjamin kelancaran arus distribusi barang dan jasa, khususnya komoditas pangan strategis, melalui peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, pembangunan jalan pendukung distribusi, penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas, penguatan sistem transportasi logistik, serta pengembangan jejaring kerja sama investasi sektor pangan. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui sinergi antar perangkat daerah guna menciptakan sistem distribusi yang efisien, aman, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung stabilitas harga serta pengendalian inflasi daerah.

1. Penguatan Kerja Sama dan Investasi Sektor Agribisnis

Sebagai bagian dari upaya memperkuat rantai distribusi dan pengembangan sektor agribisnis, Bupati Malang mendampingi delegasi Pemerintah Demokratik Timor-Leste dan Incanto Group melakukan kunjungan ke Cokro Agro Nusantara Farm di Kecamatan Jabung pada 14 April 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan potensi sektor peternakan Kabupaten Malang yang telah menerapkan sistem budidaya ayam petelur modern dan higienis, sekaligus membuka peluang kerja sama investasi, perluasan jaringan pemasaran, serta pengembangan perdagangan hasil peternakan. Penguatan jejaring investasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi rantai pasok, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing komoditas peternakan Kabupaten Malang.

2. Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten

- Dalam mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur jalan selama periode April-Juni 2026. Kegiatan tersebut meliputi peningkatan jalan kabupaten sepanjang **13,348 kilometer**, peningkatan jalan strategis sepanjang **12,210 kilometer**, rehabilitasi jalan sepanjang **6,828 kilometer**, pemeliharaan rutin jalan sepanjang **34,034 kilometer**, serta pemeliharaan melalui kegiatan **sapu lubang** sepanjang **64,300 kilometer**.
- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan tersebut bertujuan meningkatkan kemantapan jalan kabupaten, memperbaiki konektivitas antarwilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, menurunkan biaya transportasi dan logistik, serta memperlancar distribusi

◦

komoditas pangan dari sentra produksi menuju pasar maupun konsumen. Infrastruktur jalan yang semakin baik juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi sehingga mampu meminimalkan risiko keterlambatan pasokan dan gejolak harga komoditas strategis.

3. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

- Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya turut mendukung strategi kelancaran distribusi melalui pembangunan infrastruktur jalan lingkungan permukiman. Selama Tahun Anggaran 2026, kegiatan dilaksanakan di berbagai wilayah Kabupaten Malang dengan sasaran peningkatan kualitas akses jalan lingkungan sebagai pendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
- Pada Triwulan II Tahun 2026, pekerjaan telah direalisasikan pada **8 lokasi** dan seluruhnya diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan. Selanjutnya, pada Triwulan III direncanakan pelaksanaan kegiatan pada **44 lokasi** sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan konektivitas kawasan permukiman. Peningkatan jalan lingkungan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses masyarakat menuju pusat-pusat perdagangan, sentra produksi pertanian, maupun fasilitas pelayanan publik sehingga mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa di tingkat lokal.

4. Penguatan Sistem Transportasi Logistik

- Dinas Perhubungan Kabupaten Malang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor (KIR) pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Talangagung Kepanjen dan Karanglo. Kegiatan ini bertujuan memastikan kendaraan angkutan barang maupun penumpang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga distribusi logistik dapat berlangsung secara aman, tertib, dan efisien.
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor juga mendukung peningkatan keselamatan transportasi, mengurangi risiko gangguan distribusi akibat kerusakan kendaraan, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha angkutan terhadap standar pelayanan transportasi. Dengan armada angkutan yang laik jalan, distribusi komoditas pangan dapat berlangsung lebih lancar dan berkelanjutan.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

- Selain penguatan armada transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang melaksanakan penyediaan serta pemeliharaan perlengkapan jalan yang meliputi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dan *warning light* pada ruas-ruas jalan kabupaten.
- Penyediaan sarana lalu lintas tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi hambatan lalu lintas, meminimalkan potensi kemacetan, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Perbaikan sistem lalu lintas juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu tempuh distribusi komoditas dari sentra produksi menuju pasar maupun konsumen akhir sehingga mampu mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan.

6. Sinergi Infrastruktur dalam Mendukung Distribusi Pangan

- Pelaksanaan strategi kelancaran distribusi tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah,

peningkatan kualitas pelayanan transportasi, dan pengembangan sistem logistik daerah. Sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Dinas Perhubungan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem distribusi yang efisien dan berdaya saing.

- Peningkatan kualitas jalan kabupaten, pembangunan jalan lingkungan, penyediaan perlengkapan lalu lintas, serta pengujian kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap penurunan biaya distribusi, peningkatan aksesibilitas sentra produksi, kelancaran arus barang, serta penguatan konektivitas antarwilayah yang pada akhirnya mendukung efektivitas pengendalian inflasi di Kabupaten Malang.

D. Strategi Komunikasi Efektif

Strategi Komunikasi Efektif merupakan salah satu pilar utama pengendalian inflasi daerah yang bertujuan membangun kesamaan persepsi, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, memperkuat transparansi informasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi harga dan berbagai kebijakan pengendalian inflasi. Pada Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan informasi harga secara terbuka, pemanfaatan teknologi informasi, pelaksanaan komunikasi langsung dengan masyarakat, serta pelaporan berkala kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari implementasi strategi komunikasi yang terpadu.

1. Program Subuh Keliling (SULING)

- Program **Subuh Keliling (SULING)** Putaran ke-5 Tahun 2026 menjadi media komunikasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Malang dan masyarakat. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Malang dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) ini dilaksanakan secara rutin di berbagai kecamatan sebagai wadah mendekatkan pelayanan pemerintah, mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi masyarakat, serta menyampaikan secara langsung berbagai program pembangunan daerah, termasuk kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Melalui komunikasi dua arah tersebut, pemerintah memperoleh masukan dari masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dilaksanakan.
- Selama Triwulan II Tahun 2026, Program SULING dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai wilayah Kabupaten Malang, yaitu di Masjid Baitus Said, Desa Talok, Kecamatan Turen (10 April 2026); Masjid Baitut Taqwa, Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading (10 Mei 2026); Masjid At Taqwa, Desa Sukorejo, Kecamatan Tirtoyudo (22 Mei 2026); Masjid Al Aziz, Desa Amadanom, Kecamatan Dampit (29 Mei 2026); Masjid Al Munawaroh, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak (7 Juni 2026); Masjid Jami' Raudlotul Muttaqin, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis (12 Juni 2026); Masjid Baitul Muttaqin, Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan (19 Juni 2026); dan Masjid Nurul Ikhlas, Desa Gadingkembar, Kecamatan Jabung (28 Juni 2026). Pelaksanaan secara bergilir tersebut memperluas jangkauan komunikasi pemerintah hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

2. Penguatan Koordinasi Pengendalian Inflasi

- Pemerintah Kabupaten Malang secara aktif mengikuti **Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah** yang diselenggarakan secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri. Forum koordinasi tersebut menjadi sarana evaluasi perkembangan inflasi nasional dan daerah, penyampaian arahan pemerintah pusat, identifikasi potensi risiko inflasi, serta pembahasan langkah-langkah intervensi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- Partisipasi aktif dalam rapat koordinasi tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi, sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah mampu merespons perkembangan kondisi harga secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

3. Penyediaan Informasi Harga kepada Masyarakat

- Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang secara rutin menyampaikan informasi harga produk peternakan melalui **website resmi** dan aplikasi **Simponi Ternak**. Penyediaan informasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, peternak, dan pelaku usaha dalam memperoleh data harga secara cepat, transparan, dan akurat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan usaha maupun konsumsi masyarakat.
- Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan pembaruan data harga sembako setiap hari melalui platform **SP2KP Kementerian Perdagangan, SISKAPERBAPO Provinsi Jawa Timur**, serta **SIHARKEPO Kabupaten Malang** yang mencakup pemantauan di UPPD Turen, Singosari, Lawang, Karangploso, Kepanjen, dan 21 UPPD lainnya. Integrasi berbagai platform tersebut menghasilkan informasi harga yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses sebagai dasar pemantauan perkembangan harga komoditas strategis.

4. Penguatan Pelaporan dan Monitoring Kebijakan

- Dalam rangka mendukung akuntabilitas pelaksanaan pengendalian inflasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang secara rutin melakukan input data harga harian terhadap 20 komoditas bahan pokok strategis serta mengunggah bukti dukung berbagai kegiatan pengendalian inflasi TPID Kabupaten Malang ke laman resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- Pelaporan tersebut menjadi bagian dari mekanisme monitoring nasional yang bertujuan mendukung transparansi, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program, penyampaian data secara berkala juga menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas berbagai intervensi yang telah dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2026.

5. Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Mendukung Komunikasi

Pemerintah Kabupaten Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi publik melalui berbagai aplikasi informasi harga dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Pemanfaatan platform digital memungkinkan penyebaran informasi harga secara lebih cepat, meningkatkan aksesibilitas data bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-*

based policy). Melalui digitalisasi informasi, koordinasi antarperangkat daerah juga menjadi lebih efektif dalam merespons dinamika harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pelaksanaan kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum berjalan dengan baik dan menunjukkan sinergi yang kuat antarperangkat daerah serta dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN pangan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) telah dilaksanakan secara terpadu melalui berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi publik.
- Pada aspek Keterjangkauan Harga, berbagai intervensi seperti Pasar Sembako Murah Harga Terjangkau (SMART), Gerakan Pangan Murah (GPM), pengawasan distribusi Minyakita, serta monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis dan mempertahankan daya beli masyarakat. Pemanfaatan sistem informasi harga juga semakin memperkuat kemampuan pemerintah dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gejolak harga sehingga langkah intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
- Pada aspek Ketersediaan Pasokan, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil memperkuat kapasitas produksi melalui pengembangan komoditas unggulan lokal, pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, serta berbagai program peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan. Meskipun terdapat kendala dalam realisasi pengembangan kawasan bawang merah akibat keterlambatan penyaluran benih, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pengendalian inflasi.
- Selanjutnya, pada aspek Kelancaran Distribusi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan jalan lingkungan permukiman, penguatan sistem transportasi logistik, penyediaan perlengkapan lalu lintas, serta pengembangan kerja sama sektor agribisnis telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar distribusi komoditas pangan. Berbagai upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap efisiensi rantai pasok, penurunan hambatan distribusi, serta mendukung stabilitas harga di tingkat konsumen.
- Sementara itu, pada aspek Komunikasi Efektif, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil memperkuat koordinasi lintas sektor melalui keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan Program Subuh Keliling (SULING), penyediaan informasi harga melalui berbagai platform digital, serta pelaporan rutin pelaksanaan pengendalian inflasi kepada pemerintah pusat. Strategi ini meningkatkan transparansi informasi, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pengendalian inflasi.
- Secara keseluruhan, implementasi strategi 4K pada Triwulan II Tahun 2026 telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Malang. Meskipun masih dijumpai beberapa kendala, seperti belum optimalnya cakupan pemantauan harga di seluruh wilayah, keterlambatan pelaksanaan sebagian program produksi pangan, serta perlunya penguatan efisiensi rantai distribusi, pelaksanaan kebijakan secara umum telah berjalan efektif. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi

lintas sektor, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi pengawasan distribusi, serta percepatan pelaksanaan program strategis agar upaya pengendalian inflasi dapat berlangsung secara lebih adaptif, berkelanjutan, dan mampu menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di Kabupaten Malang.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Perlu dilakukan penguatan sinergi antarperangkat daerah melalui pemantauan harga yang lebih intensif, pengawasan distribusi, optimalisasi pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar secara tepat sasaran, serta koordinasi yang berkelanjutan guna menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga komoditas pangan di tingkat konsumen.
- Perlu dilakukan penguatan pengawasan distribusi, peningkatan transparansi rantai pasok, serta penguatan kemitraan antara produsen, distributor, dan pedagang guna memastikan stabilitas harga di tingkat produsen dapat diteruskan hingga ke tingkat konsumen dan menekan disparitas harga